

**SKRIPSI**  
**PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP DI DESA BONTOSUNGGU KEC GALESONG UTARA**  
**KAB TAKALAR**



**Irfan M**

**105641114517**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN  
HIDUP DI DESA BONTOSUNGGU KEC GALESONG UTARA KAB  
TAKALAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

**Irfan M**

**105641114517**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

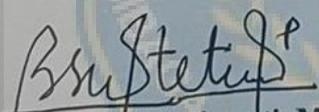
Judul Penelitian : Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan  
Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab  
Takalar

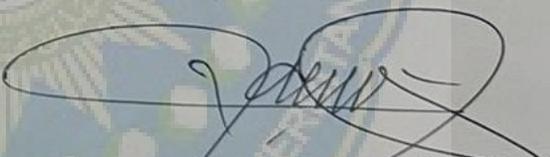
Nama : Irfan. M  
Nim : 105641114517  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si**

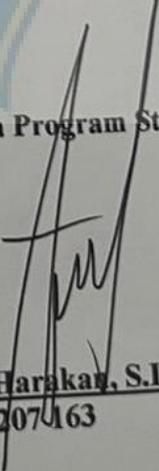
  
**Hardianto Hawing, S.T., MA**

Mengetahui :

**Dekan**

**Ketua Program Studi**

  
  
**Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si**  
**NBM.730.727**

  
**Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I**  
**NBM. 1207163**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0214/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 13 Januari tahun 2024.

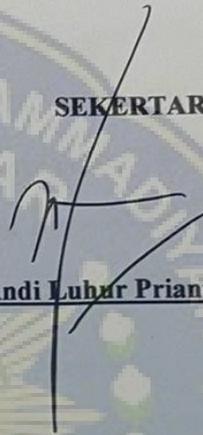
### TIM PENILAI

KETUA



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

SEKERTARIS



Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

(*Budi Setiawati*)

(*Nur Wahid*)

(*Nur Khaerah*)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irfan M

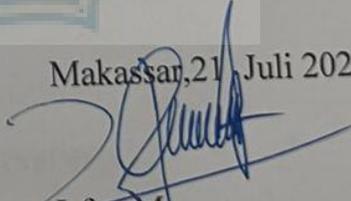
NIM : 105641114517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Penelitian dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar Takala” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 21 Juli 2023



Irfan M

## ABSTRAK

### **Irfan M. 2023 Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar.**

Pengelolaan ekosistem mangrove di Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar mengalami banyak tantangan yang disebabkan oleh tiga pokok masalah utama, yaitu; (1) Masalah sosial, seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun dan rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat, (2) Masalah ekonomi, seperti kondisi masyarakat yang masih tergolong keluarga prasejahtera yang disertai dengan pola hidup mereka yang konsumtif, (3) Masalah kelembagaan, seperti tidak tersedianya kebijakan dan rencana pengelolaan ekosistem mangrove dari pemerintah daerah setempat, kurangnya koordinasi antar lembaga (pelaku) pengelola dan kurangnya pengawasan serta pemantauan. Pada Indikator Partisipasi dalam pelaksanaan Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengelolaan mangrove dapat dikatakan full menyeluruh mungkin tidak terlalu, tetapi respon atau tanggapan atas antusias yang diberikan oleh masyarakat sangat tinggi yang mana tidak hanya untuk kegiatan pembangunan saja tapi ikut menjaga agar mangrove tetap dapat berkembang. Pada indikator Partisipasi dalam penambihan manfaat pengelolaan mangrove menjaga atau mengurangi terjadinya abrasi janda dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi dengan menjadikan tambak kepiting bakau untuk meningkatkan perekonomian. Bentuk pengambilan manfaat yang di dapatkan oleh mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan ekowisata mangrove serta memelihara hasil pembangunan mangrove. Pada indikator Partisipasi dalam evaluasi berpartisipasi dalam menjaga kelestarian mangrove serta memberikan saran serta kritik kepada pemerintah terkait pengelolaan mangrove Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi ialah di mana masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan progress dari suatu program kegiatan dana desa yang sedang atau telah dilaksanakan. Adapun Faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar tingkat keinginan masyarakat berpartisipasi secara langsung bergotong royong dalam penanaman pohon dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan mangrove.

**Kata Kunci : Peran, Partisipasi, Pengelolaan Mangrove**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar Takalar “** yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan Ibunda senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa amrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa

mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

1. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepala Desa Bontosunggu serta Jajarnya , serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI
6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.

7. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.



Makassar, 21 Juli 2023

Irfan M

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Fikir .....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Teknik Pengabsahan Data .....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian .....	44
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63

B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penataan Ruang merupakan upaya untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan manusia dalam hubungannya dengan keseimbangan ekosistem mencakup penggunaan lahan dan sumberdaya alam agar bisa terkendali dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya (Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012).

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang berdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan satu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan.

Pembangunan adalah sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan meandasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan instransi nasional ,di samping ,tetap mengejar pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpaan pendapatan serta pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat sehingga pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, serta cakupannya ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai merupakan kewenangan provinsi sedangkan kewenangan kabupaten sepertiganya dari kewenangan tersebut (Nurshodikin & Saputra, 2021).

Kawasan pesisir mempunyai potensi pembangunan yang sangat tinggi. Potensi pembangunan baik berupa sumber daya yang dapat diperbaharui seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut dan sumber daya perikanan laut serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan geologis; jasa-jasa lingkungan seperti environmental service (kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan), pariwisata, transportasi, dan sumber energi.

Konsep pembangunan berkelanjutan yaitu mengusung hak-hak pemenuhan kebutuhan sumber daya alam pada masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Disebutkan tiga aspek dari pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, social, ekonomi.

Pengelolaan pesisir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan melestarikan kawasan pesisir secara lestari. Peran masyarakat dalam

pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pengaruh Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Sakti, 2023).

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dimana dituntut untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus meminimalisir kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam generasi mendatang. Lingkungan tidak akan lestari jika tidak dijaga dan nantinya menyebabkan lingkungan dengan daya dukung yang rendah bahkan hilang.

Menurut (Sabardi, 2014) ada dua hal pertimbangan dalam pengembangan ekowisata pesisir dan laut, yaitu aspek pasar dan aspek tujuan wisata. Walaupun pengembangan ekowisata memegang konsep pengarusutamaan produk atau pasar, namun kelestarian budaya masyarakat, dan sumberdaya laut tetap terjamin dengan adanya pengembangan produk wisata. Pengembangan ekowisata pesisir dan laut lebih menekankan pada aspek pelestarian karena di dalamnya sudah mengandung aspek keberlanjutan. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama dalam mendukung kehidupan di wilayah pesisir karena memiliki produktifitas dan kompleksitas dari ekologi lingkungan yang khas.

Terdapat 3 (tiga) isu utama permasalahan pengelolaan mangrove di Indonesia, yaitu Isu ekologi lebih dari 50% total area mangrove di Indonesia berada dalam kondisi rusak, yang berakibat pada menurunnya fungsi ekologis mangrove, adanya pendapat yang menyatakan bahwa konservasi dan

rehabilitasi ekosistem mangrove untuk meningkatkan fungsi ekologi merupakan beban, bukan sebagai tanggung jawab, upaya untuk merehabilitasi mangrove yang rusak masih belum mampu mengimbangi laju kerusakan yang terjadi. Isu sosial ekonomi adanya perbedaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove di antara penentu kebijakan (policy maker) dan masyarakat, belum optimalnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan ekosistem mangrove, sebagian besar kondisi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove tergolong miskin, pemanfaatan mangrove sebagai sumberdaya yang ramah lingkungan belum berkembang. Isu Kelembagaan, koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum efektif, kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove masih belumsinergis, instansi kunci dan perannya dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum disepakati, kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove belum berkembang dan berfungsi secara optimal

Kabupaten Takalar yang beribukota di Patallasang Kecamatan Galesong Utara sebagai salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Takalar yang terluas dengan 21,75 Ha berhadapan langsung dengan Kota Makassar memiliki potensi sumber daya untuk pengelolaan lingkungan.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kabupaten Takalar pada umumnya dan Kecamatan Galesong Utara pada khususnya, maka di masa yang akan datang menjadi tantangan bagi kawasan tersebut untuk merebut peluang potensi yang ada, sehingga perencanaan penataan

wilayah pesisir perlu diarahkan secara terpadu guna mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan dengan pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh. Sesuai dengan itu, maka diperlukan arahan penataan ruang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam pesisir Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong Utara dengan menetapkan fungsi kawasan sehingga dapat berkembang dengan optimal.

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sejalan dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa perencanaan tata ruang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Sehingga nantinya dengan adanya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi

Masyarakat merupakan salah satu unsur utama di dalam system pengembangan mangrove saat ini semakin dituntut peran sertanya. Sebetulnya

sudah sejak lama model program partisipatif dikembangkan yang melibatkan masyarakat bahkan menempatkan masyarakat sebagai pelaku hutan sentral dari pengembangan yang sedang dan akan berlangsung, namun dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar mengalami banyak tantangan yang disebabkan oleh tiga pokok masalah utama, yaitu; (1) Masalah sosial, seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun dan rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat, (2) Masalah ekonomi, seperti kondisi masyarakat yang masih tergolong keluarga prasejahtera yang disertai dengan pola hidup mereka yang konsumtif, (3) Masalah kelembagaan, seperti tidak tersedianya kebijakan dan rencana pengelolaan ekosistem mangrove dari pemerintah daerah setempat, kurangnya koordinasi antar lembaga (pelaku) pengelola dan kurangnya pengawasan serta pemantauan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar?

2. Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar
2. Untuk Mengetahui Faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar
  - b. Memberikan masukan terhadap pemerintah dalam Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dalam Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang

mengkaji Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup  
Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar



## BAB II

### TINJAUAN PUSTKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. maka berikut penelitian terdahulu pada penelitian ini.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal/Skripsi	Keterangan
1	(Abd. Rasyid Syamsuri, 2022)	Penyuluhanperanan Masyarakat Terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup Di Purakaikecamatansei Lapan Kabupaten Langkatsumaterautara	peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu Kesehatan fisik semata. Pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	(Widodo et al., 2022)	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang	Masalah lingkungan hidup yang dialami negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat

			<p>secara horisontal akan melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijaksanaan. Sedangkan peran serta masyarakat secara vertikal akan mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, sedangkan hubungan tersebut saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Khusus dalam usaha pelestarian lingkungan peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah telah memberi landasan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan</p>
3	(Kurniawan et al., 2015)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang	<p>Secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mojokrapak masuk dalam kategori Pemberian Informasi atau dikategorikan dalam derajat Partisipasi Semu. Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui program Desa Berseri dan KRPL lebih banyak memberikan bantuan berupa tenaga, dibandingkan bantuan dalam bentuk uang, pemikiran atau yang lain.</p>

Berikut perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

Pada Penelitian yamsuri & Permadi, (2022) menjelaskan tentang Peran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup melalui penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat.

Pada Penelitian Widodo, Solekan, & Siswanto,( 2022) menjelaskan permasalahan lingkungan hidup secara umum dan peran masyarakat dalam pengeolaan lingkungan hidup.

Pada Penelitian Kurniawan, Soemarno, & Purnomo, (2015) menjelaskan secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada masyarakat didesa Mojokrapak.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas dapat dilihat terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada focus penelitian, Penelitian ini berfokus pada Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Konsep Peran**

Terminologi “peran” (*role*) sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Mead (1934) melalui perspektif interaksionis simbolisnya berfokus pada

peran dari factor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif dengan mana aktor-aktor sosial memahami dan menginterpretasikan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan orang lain. Sementara itu, Linton (1936) menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu dalam suatu sistem sosial yang mapan. “Peran” selanjutnya dikonsepsikan sebagai ekspektasi-ekspektasi normatif yang dipegang teguh dan menjadi landasan terciptanya perilaku-perilaku tersebut. Di sisi lain, pemikiran Moreno (1934) bertolak pada hubungan-hubungan antara ekspektasi peran dan perilaku, kondisi-kondisi sosial yang memunculkan ekspektasi tersebut, serta cara-cara dengan mana seseorang mempersepsikan ekspektasi orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku (Prayudi et al., 2019).

Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing (Biddle, 1986). Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya.

Menurut Thoha (2012:12), ada empat dimensi peran yaitu:

- a. Peran sebagai *entrepreneur*, dalam peranan *entrepreneur* melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- b. Peran sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terker isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- c. Peran sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumberdana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengabil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke 3570 bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
- d. Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan

Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku; Kaitan antara orang dan perilaku. Beberapa dimensi peran sebagai berikut:
  - a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
  - b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
  - c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
  - d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalahmasalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Srihardian, Satria, Bahtiar, Haryono, & Akbar, 2022).

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya (Syaron Brigitte et al., 2017).

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflict) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu
- f. Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya

## **2. Konsep Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009). Definisi lain untuk pengelolaan lingkungan adalah sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan kita dapat terpenuhi sebaikbaiknya (Soemarwoto, 1994). Dengan demikian,

pengelolaan lingkungan merupakan upaya terpadu pelestarian lingkungan yang meliputi berbagai upaya mulai dari pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan hingga pemulihan lingkungan. Semua itu bertujuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 ini merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi 4 area, yaitu pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya tanah dan pengelolaan sumber daya alam (Mitchell, 2000). Upaya terpadu pelestarian lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berikut adalah uraian dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut sesuai urutannya (UU No. 32 tahun 2009).

### **3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report, 1987). Emil Salim (1980 dalam Anonim, 1992) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan Inventarisasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam daerah aliran sungai, iklim, sosial budaya/ ekonomi, dan lainnya. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH memperhatikan keragaman karakter, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim. Pemanfaatan, dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Pengendalian

Pengendalian dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan melalui upaya Konservasi sumber daya alam, Pencadangan sumber daya alam Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Dan Pelestarian fungsi atmosfer

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

e. Penegakan hukum

Penegakan hukum akan sangat perlu dilakukan Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakanb. lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Fauzi dan Anna (2005) mengemukakan bahwa konsep pembangunan sumberdaya berkelanjutan mengandung keempat aspek berikut:

- 1) Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability) yakni pemanfaatan sumberdaya hutan hendaknya tidak melewati batas daya dukungnya. Peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem menjadi hal utama.

- 2) Keberlanjutan sosial-ekonomi (socioeconomic sustainability) yakni pembangunan kehutanan perlu memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pemanfaat sumberdaya hutan pada level individu.
- 3) Keberlanjutan komunitas (community sustainability) yakni keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
- 4) Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability) yakni menyangkut aspek finansial dan administrasi yang sehat sebagai prasyarat dari ketiga aspek sebelumnya

#### **4. Konsep Pembangunan wilayah pesisir**

Secara geografis wilayah pesisir terbentuk dari pertemuan antara daratan dan lautan dimana di dalamnya terjadi proses-proses fisik dan biologi yang kompleks. Secara ekologis wilayah pesisir terdiri atas sejumlah habitat daratan dan perairan yang rentan, dengan ekosistem pesisir yang unik, yang memiliki sumberdaya alam yang berharga. Ekosistem ini juga sangat terkait dengan system sosial ekonomi yang membentuk sistem sumberdaya (Scura, 1992).

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan

sumber daya serta investasi secara efisien . Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (Hajrah, 2016) .

- 1) Pitcher dan Preikshot (2001) membagi komponen pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan dalam lima dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan etika. Sedangkan Charles (2001) mengemukakan konsep pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan mengandung dimensi : Keberlanjutan ekologi, yaitu: memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem sebagai perhatian utama,
- 2) Keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan.
- 3) Keberlanjutan komunitas, yaitu: keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dan

- 4) Keberlanjutan kelembagaan, yakni: menyangkut pemeliharaan dimensi finansial dan administrasi yang sehat.

Pendekatan dalam pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan terus berkembang seiring kemajuan jaman, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan tempat. Secara ideal pembangunan berkelanjutan tujuannya sangat tidak tersentuh. Karena itu, berdasarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan harus memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Hal ini berguna untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir dan lautan yang efisien dan efektif (Munasinghe, 1994)

#### **5. Pengelolaan Mangrove**

Secara umum hutan mangrove didefinisikan sebagai tipe hutan yang tumbuh pada daerah pasang surut (terutama pantai yang terlindung, laguna, muara sungai) yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Kusmana, et al., 2003). Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan masyarakat pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia makanan bagi biota laut, penahan abrasi pantai, penahan gelombang pasang dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, hutan mangrove juga bisa berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pangan penduduk di sekitarnya.

Ekosistem mangrove atau hutan bakau termasuk ekosistem pantai atau komunitas bahari dangkal yang sangat menarik, yang terdapat pada

perairan tropik dan subtropik. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya karena mempunyai vegetasi yang agak seragam, serta mempunyai tajuk yang rata, tidak mempunyai lapisan tajuk dengan bentukan yang khas, dan selalu hijau (Irwan, 2010:135). Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembap dan belumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau atau hutan bakau. Pengertian hutan mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai (pesisir), baik daerah yang dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai (Harahab, 2010:27) payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah.

Bengen (2000) menyatakan hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh: (1) tidak terpengaruh iklim; (2) dipengaruhi pasang surut; (3) tanah tergenang air laut; (4) tanah rendah pantai; (5) hutan tidak mempunyai struktur tajuk; (6) jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri atas

api-api (*Avicenia* sp), pedada (*Sonneratia*), bakau (*Rhizophora* sp), lacang (*Bruguiera* sp), nyirih (*Xylocarpus* sp), nipah (*Nypa* sp) dan lain-lain.

Manfaat Ekosistem Mangrove Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas, serta memiliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya ekosistem mangrove dikatakan produktif dan memberikan manfaat tinggi terutama dari fungsi yang dikandungnya. Pengelompokan berbagai macam manfaat dan fungsi ekosistem hutan mangrove. Pada dasarnya manfaat tersebut, dikelompokkan terhadap manfaat langsung secara ekonomi dan manfaat atau fungsi ekologi. Kedua manfaat tersebut secara potensial mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Fungsi hutan mangrove di Indonesia menurut Saenger et al (dalam Irwan, 2010:138) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu fungsi fisik, fungsi biologik, dan fungsi ekonomi yang sangat potensial. Yang di jelaskan sebagai berikut:

- a) Fungsi Fisik yaitu: Menjaga garis pantai agar tetap stabil Mempercepat perluasan lahan; Melindungi pantai dan terbing sungai.
- b) Fungsi Biologik meliputi:Tempat benih-benih ikan, udang dan kerang-kerang dari lepas pantai;, Tempat bersarang burung-burung besar, Sebagai habitat alami bagi banyak jenis biota.
- c) Fungsi Ekonomi yang potensial antara lain: Lahan untuk tambak, tempat pembuatan garam, tempat berekreasi, dan memperoleh balok

## **6. Konsep masyarakat Pesisir**

Menurut Satria dalam Ikhsani (2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim (Anah, n.d.).

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya.

Secara sosiologis karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristiknya dari sumber daya yang dihadapi. Jika masyarakat agraris yang direpresentasikan oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relative bisa diproduksi. Karakteristik tersebut berbeda dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka.

Karakteristik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi tergantung pada lingkungan, musim, dan pasar. Masyarakat nelayan pesisir juga dikenal dengan perilaku mengeksploitasi terus menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem. Perilaku merusak dianut oleh sebagian besar nelayan untuk sumberdaya yang sifatnya terbuka, dan perilaku konservasi ditunjukkan oleh komunitas adat atau lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif.

Masyarakat peisisir memiliki sifat stratifikasi sosial yang terbuka, dimana setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh kedudukannya di dalam masyarakat, seperti kehormatan, kedudukan, kekayaan maupun pendidikannya.<sup>38</sup> Dengan adanya memberikan kehormatan tersebut hanya diberikan kepada orang yang hanya memiliki pengetahuan untuk dipercaya dan diutus di dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat pasti memiliki kedudukan,

kekayaan yang berbeda-beda tergantung bagaimana seseorang tersebut menghormatinya.

## **7. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Esmara dalam Solekhan (2014:112) bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berhubungan dengan dana, fasilitas, dan tenaga dari masyarakat itu sendiri, serta kemampuan serta untuk penyelenggaraan administrasi termasuk kodinasi secara teratur dari setiap program pembangunan.

Menurut Mardikanto (2014:200) bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang di capai dari kegiatan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab Bersama.

### **C. Kerangka Fikir**

Menurut Sugiono (2011) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptial tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang terpenting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakuka. Berikut Kerangka fikir pada penelitian ini



**Pembangunan Lingkungan Hidup Di  
Desa Bontosunggu Kec Galesong  
Utara Kab Takalar**



1. Partispasi masyarkat menurut Cohen & Uphoff
2. Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Dan Pembangunan Lingkungan Hidup yaitu tingkat keinginan masyarakat berpartrisipasi secara langsung



**Partisiapasi masyrakat dalam  
Pengelolaan Dan Pembangunan  
Lingkungan Hidup**

#### **D. Fokus Penelitian**

Adapun Fokus pada penelitian ini yaitu berfokus pada Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

2. Partisipasi dalam pelaksanaan yaitu bagaimana masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove baik dalam pemberian sumbangan tenaga ataupun alat dalam kegiatan pembangunan
3. Partisipasi dalam penambilan manfaat yaitu bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan serta memelihara hasil pembangunan mangrove
4. Partisipasi dalam evaluasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta mengumpulkan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan mangrove



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar. Dengan waktu pelaksanaan penelitian selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk melihat fenomena. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran dan narasi secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti yaitu Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti dokumen atau catatan berupa laporan dari lembaga terkait.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel (Narasumber) wawancara, menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Narasumber dalam wawancara ini diambil dari berbagai latar belakang untuk menggali keragaman pandangan atau pendapat secara komprehensif mengenai Peran Masyarakat Dalam Pembangunan

Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar.yaitu ;

**Tabel 3.1 Informan**

No	Nama	Keterangan
1	Hadija	Kepala Desa Bontosunggu
2	Surya Anas Ashari	Tokoh Masyarakat
3	Dirham Sibali	LSM
4	Muh Fadli	Ketua Karang Taruna
5	Jufri	Masyarakat

*Sumber : Dikelola Oleh Peneliti*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teknik Wawancara**

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sampel yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat tentang Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

##### **2. Teknik Pengamatan/Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait dengan Peran

Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses

pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

## **G. Teknik Pengabsahan Data**

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono (2012), dalam (Sinatriyo et al., 2019), antara lain:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi Sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada ataupun membandingkan hasil wawancara dari responden (Data Primer) dengan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda.

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti bisa melakukan pengamatan beberapa kali.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

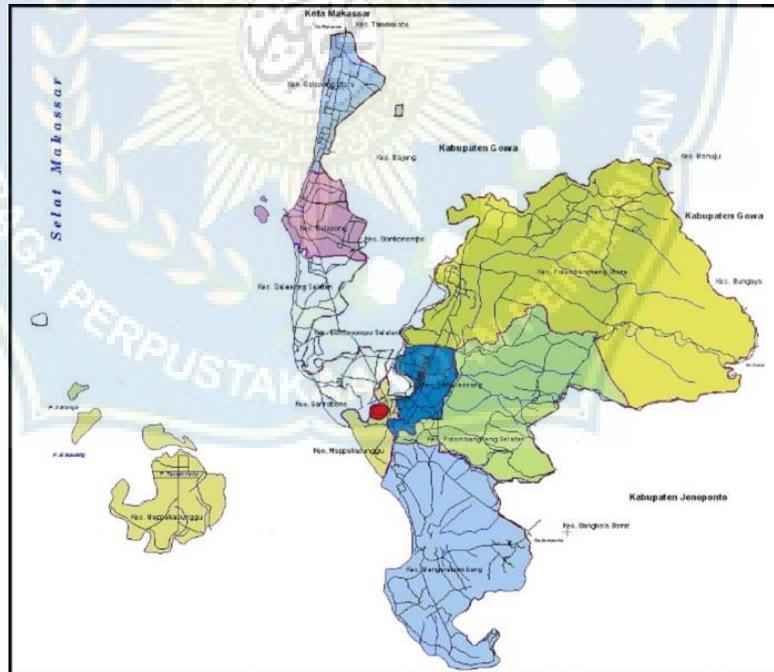
#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Gambaran Umum Kabupaten Takalar

Takalar adalah suatu daerah yang terletak di kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu kota Makassar, yang didiami beberapa suku dan agama yang berbeda. Takalar salah satu daerah di bagian selatan kota Makassar yang jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Makassar. Sebagian besar masyarakat menganut agama islam, pattallassang memiliki suatu tradisi yang dikenal sebagai *Tamu Taung*.

Kabupaten Takalar sebagai wilayah yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama-sama dengan Makassar, gowa, pangkajene kepulauan dan jeneponto. Takalar membawa beberapa wilayah (adat gemen chap) yaitu, district Polombangkeng, district galesong, distrisct Laikang, district Topejawa, District Takalar dan Sanrobone. Setiap district diperintah oleh Kepala pemerintah yang bergelar karaeng, kecuali district tope jawa yang di perintah oleh kepala pemerintahan yang bergelar *Lo'mo*. Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka polombangkeng dijadikan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Polmbangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, dan Galesong dijadikan 2 (dua) yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan utara, Topejawa, Takalar. Laikang, dan Sanrobone menjadi kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi Kecamatan Pattallassang (Kecamatan ibukota) dan terakhir dengan perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April dan perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemakaran dari kecamatan Mappakasunggu) dan kecamatan Galesong (Pemakaran Galesong Selatan dan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilang) buah kecamatan, sebagian kecamatan ini membawahi sejumlah 82 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk + 252,275 jiwa.



Takalar terletak kurang lebih 29 km dari arah selatan kota Makassar, dengan luas wilayah 566,51 km<sup>2</sup> dengan letak geografisnya yaitu:

- a. Takalar Bagian timur meliputi wilayah Polombangkeng utara dan Polombangkeng Selatan merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). Wilayah ini merupakan yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.
- b. Takalar Bagian tengah (wilayah Pattallassang, ibu kota Takalar) merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga diwilayah ini cocok dengan pertanian, perkebunan, dan pertambakan.
- c. Takalar bagian barat (meliputi mangarabombang, Galesong utara, Galesong selatan, Galesong kota, Mappasunggu dan Sanrobone) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup untuk pertanian dan perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, dan rumput laut diwilayah ini diduga cukup potensi untuk dikembangkan.

## **2. Deskripsi Gambran Umum Desa Bontosungu**

### **a. Sejarah Desa Bontosungu**

Sejarah atau legenda Bontosungu berawal dari pemerintahan Matoa pertama yakni Matoa Bpnto yang dijuluki juga sebagai Tangaraka yang diberikan oleh kerajaan Galesong saat itu. Julukan ini konon diberikan karena setiap persoalan yang di hadapi Karaeng Galesong saat itu selalu meminta tangara (pertimbangan ) kepada matoa ini yang merintis permukiman bersama masyarakat dan kemudian di lanjutkan Matoa Surati, Matoa Cema dan Matoa Mahaming.

Desa Bontosunggu merupakan salah satu desa di kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 4787 jiwa yang sebagian wilayahnya berupa kawasan pesisir. Secara administrasi berbatasan :

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampong Beru.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamasaju.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah pesisir, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Mandalle kabupaten Gowa.

Luas wilayah desa Bontosunggu tercatat 12,25Km<sup>2</sup> ( 17,68% terhadap luas kecamatan ) yang terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Bontosunggu, dusun Kalongkong, dusun Maccini Sombala dan dusun Tamasongo. Dengan 10 RW/RK serta 20 RT. Jarak dari kecamatan Galesong Utara mencapai 3 km sedangkan jarak dari ibukota kabupaten Takalar mencapai 30 km yang melalui kecamatan galesong, Galesong Selatan, Kecamatan Bontonombo Selatan, dan kecamatan Sanrobone.

Desa Bontosunggu merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan laut. Potensi sumber daya alam desa Bontosunggu yaitu padi, jagung, ikan, kepiting, udang dan berbagai sumber laut lainnya

**b. Struktur Organisasi Desa Bontosungu**



## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teori Partispasi masyarkat menurut Cohen & Uphoff dengan 3 indikator Partispasi dalam pengambilan Keputusan yaitu Partispasi dalam pelaksanaan,Partispasi dalam penambilan manfaat dan Partispasi dalam evaluasi

Teori merupakan seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan yang lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati. Teori juga berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati

### **1. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar**

Seperti yang tercantum pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan pasal ini maka kehidupan suatu negara tidak bisa terlepas dari pembangunan. Namun, akhir-akhir ini lingkungan menjadi isu yang banyak dibicarakan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan yang dapat membahayakan eksistensi lingkungan itu sendiri, terutama aktivitas dalam hal pembangunan. Salah satu kerusakan lingkungan yang paling banyak terjadi adalah kerusakan pada hutan mangrove.

Sumberdaya alam merupakan aset penting suatu negara dalam melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi. Sumberdaya alam selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, juga memberikan

kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa (*wealth of nation*). Salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang sangat penting adalah ekosistem mangrove dan terumbu karang. Terumbu karang dan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik fungsi fisik, ekologi maupun secara ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat dan pemerintah.

Mangrove merupakan ekosistem dengan sifat dan bentuk yang unik serta mempunyai fungsi dan manfaat yang beragam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya (Gunarto, 2004). Ekosistem mangrove di Indonesia merupakan ekosistem yang terbesar, sedangkan di permukaan mangrove merupakan salah satu ekosistem langka karena luasnya hanya 2% dari permukaan bumi.

Hutan mangrove sangat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung ditinjau dari segi ekonomi yaitu dapat memberikan nafkah kepada manusia, yakni sebagai penghasil kayu untuk berbagai keperluan, pemasok ikan, udang, kepiting, kerang. Sedangkan dari segi ekologi, komunitas mangrove memberikan sumbangan bagi kehidupan diperairan karena kemampuannya mendukung eksistensi lingkungan biota maupun lingkungan fisik dan lingkungan biota hutan mangrove memberikan sejumlah besar makanan yang berupa detritus bagi organisme perairan (Rahman & Pansyah, 2019).

Ekowisata hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan wilayah pesisir. Hutan mangrove memiliki peran ekologis, antara

lain sebagai penyedia nutreïn bagi biodata perairan, tempat pemijahan, dan asuhan (*nursery ground*) bagi bermacam biota, dan penahan abrasi pantai. Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) maupun aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat local. Hutan mangrove di Kabupaten Takalar khususnya di desa Bontosunggu Kecamatan Galesong terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan luas lahan tersebut dapat juga berdampak pada terganggunya ekosistem pesisir yang ada, tidak adanya penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai biota, tidak adanya penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah dan pencegah interusi air laut dan lain sebagainya.

Pada umumnya partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat saat pemantauan sampai dengan evaluasi, untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku. Untuk mewujudkannya kehadiran dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka, hal itu akan membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan maupun pelaksanaan program yang tepat. Peran masyarakat dalam subjek pembangunan sangat diperlukan sehingga berkembang menjadi pembangunan partisipasi.

Pada Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphof dengan indikator Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam penambihan manfaat dan Partisipasi dalam evaluasi.

**a. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan**

Pembangunan partisipatif menempatkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat secara sadar dan mandiri, dan hal itu dilakukan melalui berbagai program pembangunan partisipatif dengan harapan dapat menembus semua elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dengan berbagai macam bentuk seperti mencurahkan pemikiran atau bahkan mengerahkan sumber daya yang dimiliki.

Pada dasarnya pembangunan dan lingkungan terikat satu sama lain dan saling mempengaruhi sehingga pesatnya pembangunan, peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi suatu hal penting. Menentukan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang dibuat menyangkut kepentingan bersama atau perencanaan. Wujud dari partisipasi ini adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan berbagai gagasan ataupun pemikiran dalam diskusi terbuka.

Pada Penelitian ini yang di maksudkan dengan Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu Tahap atau proses kegiatan pengambilan keputusan Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu

Kec Galesong Utara Kab Takalar, dimana pada tahap tersebut bagaimana masyarakat bersama dengan para stakeholder lainnya untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan program maupun kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Sumbangsih ini pun menjadi salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk ikut terlibat pada proses kegiatan yang dilakukan melalui pertemuan, kehadiran maupun peran.

Berikut hasil wawancara bersama H sebagai Kepala desa Bonto sungu

“Partisipasi masyarakat sangat di perlukan salam pembangunan, di mana solusi masukan yg konstruktif dari masyarakat dapat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan ini sangat Jelas terlihat di mana dalam rencana pembangunan mangrove ini di desa Bontosunggu kita kaji dulu, apa yg di inginkan masyarakat karna tentunya nanti Masyarakat sendiri yg menerima dampaknya”. (Hasil wawancaara pada 13 Juli 2023)

Selanjunya di sampaikan oleh SAA Sebagai Tokoh Masyarakat desa Bontosungu

“Partisipasi masyarakat harus di ambil dalam memutuskan guna menciptakan hal baik di masyarakat, kan baik kalau kita *sipakatau sipakalabbi*. (Hasil wawancaara pada 13 Juli 2023)

Hal serupa di sampaikan oleh DS sebagai LSM desa Bontosungu

“Masyarakat sejatinya adalah segalanya jadi harus berpartisipasi minimal memberikan masukan ke pemerintah, yang terlibat pasti pemerintah dan masyarakat dan pasti lembaga desa serta para muda Pasti perlu partisipasi karna nanti ada apa” masyarakatnya protes karna tidak di tanyak programnya setamenjaga mangrove nya agar berkembang adalah bagian dari pembangunan” (Hasil wawancaara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diaas dapat dilihat bahwa dalam partisipasi Pengambilan Keputusan masyarakat diikut sertakan dalam bentuk mengikuti rapat yang di selenggarakan pemerintah desa serta penyampaian langsung diluar rapat yang dilaksanakan pemerintah desa. Berikuh hasil wawancara bersama MF sebagi Ketua Karang taruna

“Masyarakat harus mengeluarkan pendapatnya, pandangan yg memang dia yakini ini bagus dalam pembangunan adapun yang terlibat masyarakat pemuda, dan semua element masyarakat. Perlu dan sangat perlu nanti masyarakat yg dapat fick beck nya. dalam Pembangunan mangrove itu. Bgaimana menjaga dan dibuatkan minimal aturan yg bisa menjaga tumbuhan ini.” (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Selanjunya di sampaikan Jufri Mayarakat desa Bontosungu

“Partisipasi kami sebagai masyarakat kalo dalam pengambilan keputusan itu biasa di dalam rapat yang biasa diadakan nanti dirapat itu kami mengeluarkan pendapat serta keluhan apalagi tentang pengelolaan mangrove.” (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan pengeolaan mangrove masyarakat turut berpartisipasi dengan menyamoaikan aspirasi melalui rapat yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Kehadiran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memberikan pertumbuhan serta dorongan pada masyarakat melalui pembentukan forum diskusi publik yang memungkinkan masyarakat untuk turut ikut serta dalam memutuskan atau mengembangkan suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **b. Partisipasi dalam pelaksanaan**

Hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai potensi keindahan alam dan lingkungan berupa komponen penyusun ekosistem yang terdiri vegetasi, biota atau organisme asosiasi, satwa liar dan lingkungan sekitarnya. Fungsi lingkungan yang diperoleh dari hutan mangrove antara lain sebagai habitat, daerah pemijahan, penyedia unsur

hara, dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga merupakan areal tempat penelitian, pendidikan dan ekowisata.

Keberadaan mangrove sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang ada disekitarnya maupun yang tinggal jauh dari hutan mangrove. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove sudah sejak lama secara turun menurun pada dasarnya memahami bahwa hutan mangrove merupakan sumber kehidupan mereka. Ketergantungan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan pangan (ikan, udang, kepiting, kerang), kayu untuk pemukiman, kayu bakar, arang, dan dedaunan dari mangrove sangatlah ditentukan dari keberadaan hutan mangrove. Namun, biasanya yang diambil adalah seperlunya saja dan tidak sampai merusaknya. Mereka lebih bijaksana dan mengerti untuk mempertahankan serta melestarikan hutan mangrove demi kepentingan mereka sendiri

Kerusakan mangrove diantaranya disebabkan oleh tekanan dan laju pertumbuhan penduduk, terutama di daerah pesisir, sehingga mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan, akibatnya ekosistem hutan mangrove dengan cepat menipis dan rusak. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Kegiatan lain adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya ikan, udang dan kepiting yang memberikan kontribusi besar bagi

kerusakan hutan mangrove, sehingga fungsi dan ekosistem yang ada di sekitar mangrove menjadi hilang.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah upaya manusia dalam mengubah sumberdaya alam agar diperoleh manfaat yang maksimal dengan mengutamakan kontinuitas produksi (Soerianegara seperti yang dikutip Harahap 2001), begitu juga dengan pengelolaan ekosistem mangrove tersebut yaitu untuk mendapatkan produksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif singkat demi mencapai suatu keadaan yang seimbang antara pertumbuhannya dengan hasil yang dipanen setiap tahun atau jangka waktu tertentu (Sofli, 2003). Tujuan utama pengelolaan hutan, termasuk hutan mangrove adalah untuk mempertahankan produktivitas lahan hutan sehingga kelestarian hasil merupakan tujuan utama pengelolaan hutan. Kelestarian produktivitas memiliki dua arti, yaitu kesinambungan pertumbuhan dan kesinambungan hasil panen. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan.

Pada Penelitian ini Partisipasi yang dimaksud Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosungu pada pelaksanaan pengelolaan mangrove. Seringkali partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sedikit terlupakan, karena tidak banyak terjadi masyarakat sukarela memberikan bantuannya. Tetapi, di lain pihak

terdapat suatu lapisan yang lebih memanfaatkan suatu hasil tanpa adanya keikutsertaan secara proporsional. Maka dari itu, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dapat meminimalisir hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Berikut hasil wawancara bersama H sebagai kepala desa

Bontosungu

“Masyarakat berpartisipasi yahh bagaimana masyarakat Menjaga kebersihan lingkungannya agar nantinya mangrove ini mudah bersih yaa muda perkembangannya. Pohon mangrove ini nantinya jangan di jadikan tempat pembuangan supaya nanti banyak asas manfaat yg bisa Kita dapat kemudian Bentuk pelaksanaan pembangunan mangrove rencananya kita langsung tanam saja yaa lalu kita jaga mangrove ini agar nantinya kedepan ada banyak asas manfaat yg kita peroleh dari hasil mangrove ini yahh itu yg harus kita jaga” (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Selanjutnya disampaikan SAA sebagai tokoh masyarakat desa Bontosungu

“ Masyarakat banyak berpartisipasi bagaimana menyiapkan lingkungan yg baik, Menyisipkan tanamannya juga, Menjaga juga agar tetap berkembang. Bentuknya pembangunan mangrove tdk banyakji palingan mengembangkan saja bantu tanam dan menjaga “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Hal serupa disampaikan DS sebagai LSM desa Bontosungu

“Partisipasi masyarakat yaa misalnya ikut menanam, ikut menjaga, dan juga menyosialisasikan bahwa mangrove ini adalah bahan bagus untuk masyarakat kedua Yaa bentuknya menanam tdi dan menjaga serta membuat aturan yg untuk k bgaikan mangrove dan masyarakatnya.” “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove masyarakat berpartisipasi baik itu dalam proses penanaman dan juga dalam menjaga agar tetap berkembang.

Selanjutnya disampaikan oleh MF ketua karang taruna desa

Bontosungu

“Partisipasi masyarakat yaaa bisa menanam menjaga agar bisa lebih optimal lah ini barang dan Menjaga dan merawat itu bagian dari pembangunan yaa. “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Disampaikan juga oleh J masyarakat desa Bontosungu

“Kami sebagai masyarakat menjaga mangrove yang sudah ada dan juga melakukan penanaman kembali untuk mangrove yang sudah rusak “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove sudah berjalan sesuai dengan teori partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan,dalam pengelolaan mangrove dapat dikatakan full menyeluruh mungkin tidak terlalu, tetapi respon atau tanggapan atas antusias yang diberikan oleh masyarakat sangat tinggi yang mana tidak hanya untuk kegiatan pembangunan saja tapi ikut menjaga agar mangrove tetap dapat berkembang.



*Gambar 1 Proses Penanaman Mangrove*

**c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat**

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi (2005:46). Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting dalam memangku dan mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan apa saja yang terlibat dalam pembangunan lingkungan hidup, dan harus menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat setempat merupakan aktor dari segala pembentukan pembangunan.

Mangrove yang selama ini hanya di anggap penahan abrasi pantai dan pohon biasa ternyata dapat memberi dampak yang lebih yakni dengan dikembangkan menjadi ekowisata yang memberikan nilai edukasi baik pada masyarakat, maupun wisatawan, nilai social-budaya masyarakat terangkat, dan menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Berikut hasil wawancara bersama H sebagai kepala desa Bontosungu

“Manfaat yang di dapatkan masyarakat banyak yahh menjaga dari terjadinya abrasi, Menjaga cuaca juga karna kalau ada pohon tidak terlalu panas, Dari segi ekonomi juga ada yahh tempatnya bisa juga kita buka untuk wisata dan pengembangan kepiting bakau“(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Selanjutnya di sampaikan SA sebagai tokoh masyarakat desa Bontosungu

“Banyak nanti manfaat ini terutama menjaga dari abrasi yaaa karna nanti akarnya nanti kuat ini tdk bakalan goyah di terjang ombak “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berikut hasil wawancara bersama DS LSM desa Bontosungu

“Manfaat nya ada mencegah abrasi dari segi ekonomi juga ada bgaimana masyarakat memanfaatkan untuk di jadikan tambak kepiting bakau juga bisa. “(Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa maanfaat yang di dapat kan masyarakat dalam pengelolaan mangrove selain menjaga atau mengurangi terjadi nya abrasi juda dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi dengan menjdiakan tambak kepiting bakau untuk meningkatkan perekonomian. Bentuk pengambilan manfaat yang di dapatkan oleh mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan ekowisata mangrove serta memelihara hasil pembangunan mangrove.

#### **d. Partisipasi dalam evaluasi**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan hutan mangrove. Upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove sangat diperlukan, agar kelestarian ekosistem hutan mangrove dapat terjaga dan terpelihara. Strategi pengelolaan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat lokal dipandang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan satu arah yang hanya melibatkan pemerintah.

Partisipasi evaluasi bekaitan dalam pelaksanaan program secara menyeluruh. Yang artinya pada partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui

ketercapaian program. Pada Penelitian ini yang di maksud partisipasi masyarakat dalam evaluasi untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan datang.

Ekosistem mangrove mempunyai peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dapat dicapai jika mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek fisik maupun non fisik. Banyaknya stakeholders yang berkepentingan terhadap ekosistem mangrove berpotensi sebagai sumber konflik yang menyebabkan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan menjadi tidak efektif dan sering kali mengalami kegagalan. Kegagalan pengelolaan mangrove diindikasikan karena minimnya pelibatan masyarakat dan kebijakan manajemen yang bersifat top down. Pemerintah perlu memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar Kawasan untuk turut berperan dalam upaya pengelolaan mangrove dan pengawasannya, juga untuk meminimalisir konflik yang menjadi penghambat dalam pengelolaan mangrove. Maka dari itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam memperhatikan persepsi dan nilai mangrove bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa mangrove merupakan suatu ekosistem hutan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola mangrove berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan

Kegiatan partisipasi masyarakat yang dilihat dalam tahap evaluasi meliputi pemeliharaan, dan pertemuan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan pemeliharaan mangrove.

Berikut hasil wawancara bersama H sebagai kepala desa Bontosungu

“ Masyarakat aktif mengevaluasi memberikan kritik saran kepada pemerintah untuk perbaikan masyarakat nanti kedepanya kita LSM siap untuk menjadi partensip masyarakat guna terciptanya kondusifitas“(Hasil wawancaara pada 13 Juli 2023)

Selanjutnya disampaikan SAA sebagai tokoh masyarkat desa bonto sungu “Yaa masyarakat berpartisipasi nanti melihat apa yg harus di lakukan pemerintah apa yg kurang dan seperti apa nanti solusinya” “(Hasil wawancaara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam evaluasi masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian mangrove serta memberikan saran serta kritik kepada pememrintah terkait pengelolaan mangrove

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi ialah di mana masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan progress dari suatu program kegiatan dana desa yang sedang atau telah dilaksanakan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosungu Kec Galesong Utara Kab Takalar**

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini berkenaan dengan cara pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat

manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan dalam memahami ini menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama ketika berhubungan dengan alam. Aktivitas produksi dan perilaku konsumtif manusia melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. Selain itu paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan kemajuan sains dan teknologi ikut mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan. Upaya untuk penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan baik melalui penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), upaya pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, undang-undang maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi serta program-program teknis lain juga telah banyak dilakukan. Tetapi dari banyaknya pendekatan yang dilakukan masih belum bisa mengatasi masalah lingkungan

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat diperlukan agar pemerintah tidak bertindak sendiri dalam mengatur tata ruang kota, pembangunan gedung-gedung, pembangunan tempat-tempat umum, ruang terbuka dan sebagainya. Masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan lingkungan. Apabila tidak ada

pengawasan dari masyarakat dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan pemerintah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Masyarakat seringkali menjadi korban pembangunan atau kegiatan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya. Berikut hasil wawancara bersama H kepala desa Bontosungu

“factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove salah satunya tingkat keinginan masyarakat untuk mau turun langsung baik dalam proses penanaman atau dalam memberikan saran kepada pemerintah setempat terkait dengan pengelolaan mangrove” (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Selanjutnya disampaikan DS LSM desa Bontosungu

“kalo partisipasi secara langsung dalam untuk turun langsung dalam proses penanaman dalam hal ini gotong royong masyarakat sangat tinggi namun kalo dilihat dari segi pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan mangrove masih sangat kurang dapat dilihat bahwa dalam pengelolaannya masih kurnag masyarakat untuk membuka tambak misalnya yang ini kan bisa menjadi sumber pendapatan” (Hasil wawancara pada 13 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan mangrove yaitu tingkat keinginan masyarakat berpartisipasi secara langsung bergotong royong dalam penanaman pohon dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan mangrove.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan pendapat Cohen dan Uphoff terhadap partisipasi masyarakat, dapat dipahami bahwa empat indicator partisipasi dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan sejauh apa peran yang diambil untuk turut terlibat pada Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosungu Kec Galesong Utara Kab Takalar.

Partisipasi menurut Keith Davis yang juga diungkapkan oleh Winardi (1990: 202) adalah turut sertanya seseorang, baik secara mental maupun secara emosional dalam memberikan sumbangsih-sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan terkait keterlibatan pribadi seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hal tersebut.

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir umumnya berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris. Masyarakat agraris yang direpresentasikan oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Sementara masyarakat pesisir atau nelayan menghadapi sumberdaya yang hingga saat ini bersifat open access, sehingga karakteristik sumberdaya seperti ini menyebabkan nelayan berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal dengan ketidakpastian dan memiliki resiko yang tinggi. Kondisi sumber daya tersebut dapat menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka. Oleh sebab itu, tidak sedikit nelayan juga bekerja dan merangkap sebagai petani. Hal ini didukung dengan kondisi ekosistem yang memang memungkinkan seperti tersedianya area lahan persawahan di sekitar pantai meskipun lahan pertanian tersebut sering terkena air laut. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam,

sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah upaya manusia dalam mengubah sumberdaya alam agar diperoleh manfaat yang maksimal dengan mengutamakan kontinuitas produksi .

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove lebih ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang edukatif, hijau, bersih dan menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya alam merupakan upaya manusia dalam mengubah sumberdaya alam agar diperoleh manfaat yang maksimal dengan mengutamakan kontinuitas produksi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar Pada Indikator bahwa dalam pengambilan keputusan pengelolaan mangrove masyarakat turut berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi melalui rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pada Indikator Partisipasi dalam pelaksanaan Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, dalam pengelolaan mangrove dapat dikatakan full menyeluruh mungkin tidak terlalu, tetapi respon atau tanggapan atas antusias yang diberikan oleh masyarakat sangat tinggi yang mana tidak hanya

untuk kegiatan pembangunan saja tapi ikut menjaga agar mangrove tetap dapat berkembang. Pada indikator Partisipasi dalam penambihan manfaat pengelolaan mangrove menjaga atau mengurangi terjadinya abrasi janda dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi dengan menjadikan tambak kepiting bakau untuk meningkatkan perekonomian. Bentuk pengambilan manfaat yang di dapatkan oleh mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan ekowisata mangrove serta memelihara hasil pembangunan mangrove. Pada indikator Partisipasi dalam evaluasi berpartisipasi dalam menjaga kelestarian mangrove serta memberikan saran serta kritik kepada pemerintah terkait pengelolaan mangrove Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi ialah di mana masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan progress dari suatu program kegiatan dana desa yang sedang atau telah dilaksanakan.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar tingkat keinginan masyarakat berpartisipasi secara langsung bergotong royong dalam penanaman pohon dan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan mangrove.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar

1. Secara keseluruhan peran masyarakat dalam Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar sudah berjalan sesuai dengan teori partisipasi.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait pengelolaan mangrove selain penahan abrasi pantai.

#### **B. Saran**

Partispasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan mangrove baik dalam bentuk pelatihan ataupun sosisi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid Syamsuri, N. P. (2022). Penyuluhan Peranan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatera Utara Abd. 1(1), 9–18.
- Anah, E. S. (N.D.). Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 138–153.
- Hajrah, A. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Yang Berkelanjutan Bagi Pengembangan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota. Fakultas Sains Dan Teknologi. Uin Alauddin Makassar.
- Kurniawan, M. A., Soemarno, & Purnomo, M. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari (J-Pal)*, 6(2), 89–98.
- Nurshodikin, M., & Saputra, S. (2021). Analisa Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Coastal Area Kabupaten Karimun. *Jurnal Pelita Kota*, 2(I), 19–24. <https://doi.org/10.51742/Pelita.V2ii.295>
- Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449–467. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2018.V2.I4.3931>

Sabardi, L.-. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V3i1.10120>

Sakti, W. I. (2023). Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 1, 87. <https://doi.org/10.15578/Jkpt.V1i0.12058>

Syaron Brigitte, Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

Widodo, A., Solekhan, M., Siswanto, B., Diterima, N., & Diterbitkan, N. (2022). 1670-5646-1-Pb. 07(01), 132–146.

L

A



M

P

I

R

A

N







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1927/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

27 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2009/FSP/A.1-VIII/VII/1444 H/2023 M tanggal 15 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IRFAN M

No. Stambuk : 10564 1114517

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BONTOSUNGGU KEC. GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Juli 2023 s/d 19 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



NBM 1017716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **21656/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Takalar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1927/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IRFAN M**  
Nomor Pokok : **105641114517**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BONTOSUNGGU KEC GALESONG UTARA KAB TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juli s/d 21 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 20 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal*



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar*

Takalar, 21 Juli 2023

Nomor : 310/IP-DPMPTSP/VII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Desa Bontosunggu Kec. Galesong Utara  
Kab. Takalar  
Di-  
Takalar

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 21656/S.01/PTSP/2023, tanggal 20 Juli 2023, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/315/BKBP/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : IRFAN. M  
Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 20 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar  
Alamat : Tamasongo Desa/Kel. Bontosunggu  
Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**“PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA BONTOSUNGGU KEC. GALESONG UTARA KAB. TAKALAR “**

Yang akan dilaksanakan : 21 Juli 2023 s/d 21 Agustus 2023  
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Plt. Kepala Dinas,  
**DES. ANDI RIJAL MUSTAMIN. M.M**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197407131992111001

**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar ;
5. Peninggal;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Irfan M

Nim : 105641114517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nusriana, S.Pd., M.P.  
NIM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)

fan M 105641114517 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



1%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadnin.unismuh.ac.id](http://digilibadnin.unismuh.ac.id)  
Internet Source

3%

2

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)  
Internet Source

3%

3

Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper

2%

4

[jdih.kkp.go.id](http://jdih.kkp.go.id)  
Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

rfan M 105641114517 BAB II

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainmataram.ac.id

Internet Source

2%

2

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

2%

3

www.jogloabang.com

Internet Source

2%

4

meilindasuriani.wordpress.com

Internet Source

1%

5

ejournal.stiesia.ac.id

Internet Source

1%

6

www.scribd.com

Internet Source

1%

7

pustaka.ut.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.uny.ac.id

Internet Source

1%

9

Submitted to IAIN Pontianak

Student Paper

1%

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

3%

2

doku.pub

Internet Source

2%

3

stuffspec.com

Internet Source

2%

4

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

n M 105641114517 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	core.ac.uk Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%
5	melatijournal.com Internet Source	1%
6	repository.umi.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%
9	Suroso - Suroso. "Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir",	1%

ffan M 105641114517 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

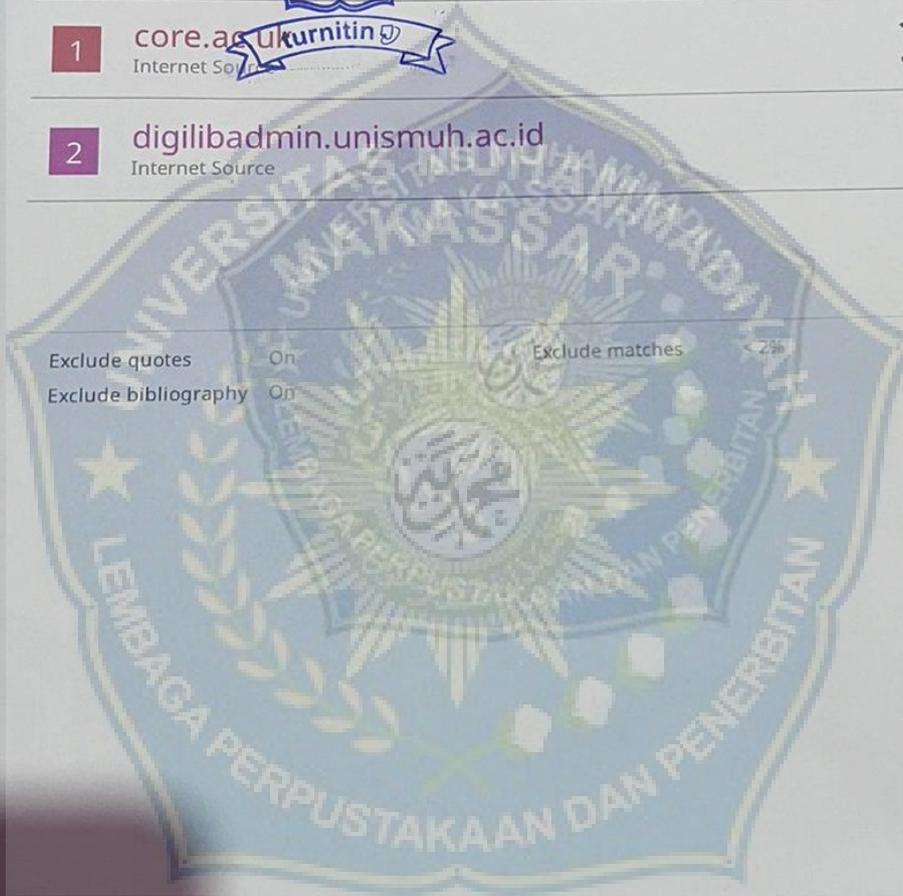
On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama **Irfan M** lahir di dusun tamasongo desa Bontosunggu ke galesong utara kab takalar 20 Agustus 2000. Anak dari Mantang rate hasnia Kamma.

Saat ini penulis beralamat di jl muh nur dusun desa Bontosunggu kec galesong utara kab takalar. Penulis ini pertama kali memasuki jenjang pendidikan di TK

Kartini Bontosunggu pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 97 tamasongo dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah mandalle dan tamat pada tahun 2014. setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Takalar dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis terdftar sebagai mahasiswa di Universitas muhammadiyah makassar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik prodi ilmu pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan gelar S1 pada program studi ilmu pemerintahan dengan judul **Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Di Desa Bontosunggu Kec Galesong Utara Kab Takalar**. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.